



Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Terhadap Keberhasilannya di Kota Medan

Marisa Yanti R Sipahutar¹, Tunggul Sihombing², Asima Yanty Siahaan³

Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

myrumondang.bkkbn@gmail.com tunggul@usu.ac.id asimayantysiahaan@gmail.com

Received : Mei 21, 2025; Accepted : Oct 30, 2025

DOI 10.25299/jiap.2025.22552

Abstract

This research aims to examine and analyze the effect of the implementation of the operational assistance for family planning policy on the success of the modern family planning program in Medan. The method used was an associative method with quantitative data analysis. Data analysis was performed using Smart PLS software version 4.1.1.5, which included validity and reliability tests for the measurement model, as well as hypothesis testing to measure the influence between policy implementation variables and programme success. The results of the research indicate that the variable implementation of the operational assistance for family planning policy affects the variable success of the modern family planning program by 0.883. This is consistent with hypothesis testing results, where the t-statistic value is 47.581, while the t-table value is 1.66, thus t-statistic > t-table (47.581 > 1.66) with a significance level of 0.000. For the independent variable, the most influential indicator is the disposition or attitude of implementers, while the least influential is human resources. For the dependent variable, the most influential indicator is the alignment of the program with its benefits, while the least influential is the alignment of the beneficiary group with the implementing organization. The coefficient of determination shows that 78% on the success of the modern family planning program is affected by the implementation of the operational assistance for family planning policy, while 22% is affected by other variables not included in this research.

Key Words : Policy Implementation, Program Success, Modern Family Planning

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan BOKB terhadap keberhasilan program KB modern di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan analisis data kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 4.1.1.5, yang meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk model pengukuran, serta uji hipotesis untuk mengukur pengaruh antara variabel implementasi kebijakan dan keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan BOKB berpengaruh terhadap variabel keberhasilan program KB modern sebesar 0,883. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis, dimana nilai t hitung sebesar 47,581, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,66, dengan demikian t hitung > t tabel (47,581 > 1,66) dengan tingkat signifikansi 0,000. Untuk variabel independen, indikator yang paling berpengaruh adalah disposisi atau sikap pelaksana, sedangkan yang paling tidak berpengaruh adalah sumber daya manusia. Untuk variabel dependen, indikator yang paling berpengaruh adalah keselarasan program dengan manfaatnya, sedangkan yang paling tidak berpengaruh adalah keselarasan kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 78% keberhasilan program KB modern dipengaruhi oleh implementasi kebijakan BOKB, sedangkan 22% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Key Words : Implementasi Kebijakan, Keberhasilan Program, Keluarga Berencana Modern

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan penting bagi semua negara, termasuk Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, populasi Indonesia mencapai 278,7 juta jiwa pada tahun 2023, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Prediksi menunjukkan bahwa populasi Indonesia akan meningkat menjadi 321 juta pada tahun 2050 (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan laju pertumbuhan yang cepat dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menimbulkan berbagai masalah kependudukan (Khalish et al., 2020). Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Program Keluarga Berencana di Indonesia dimulai pada masa Orde Baru dengan tujuan untuk mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meskipun Program Keluarga Berencana Nasional telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kelahiran, namun peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga, terutama kesehatan ibu dan anak, masih menjadi tantangan utama (Erliani, 2017). Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), seperti yang ditunjukkan oleh data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, merupakan indikator penting yang perlu mendapat perhatian serius. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya AKI dan AKB, seperti kehamilan yang tidak diinginkan ('empat terlalu': terlalu muda,

terlalu banyak, terlalu dekat, dan terlalu tua), menunjukkan perlunya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi (Badan Pusat Statistik et al., 2018). Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dalam mewujudkan kabupaten layak anak merupakan faktor penting dalam keberhasilan program keluarga berencana, karena kesehatan ibu dan anak merupakan bagian integral dari tujuan program (Rizki et al., 2024).

Sebelum desentralisasi, program Keluarga Berencana (KB) Modern sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, yang mengendalikan pendanaan dan pelaksanaannya. Namun, setelah desentralisasi, pengelolaan dialihkan ke pemerintah daerah, yang menyebabkan penurunan prioritas dan komitmen terhadap program ini di tingkat daerah. Bukti dari hal ini adalah variasi anggaran dan perbedaan nomenklatur di antara dinas-dinas KB di berbagai daerah, serta rendahnya pemanfaatan dana BOKB (Abrianty & Sujarwoto, 2017). Selain itu, keragaman kelembagaan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan dinas-dinas di daerah telah mempersulit upaya untuk menurunkan angka kelahiran total dan meningkatkan partisipasi dalam program KB. Selain itu, anggaran daerah untuk program keluarga berencana telah menurun secara signifikan karena kurangnya komitmen dari para pemimpin daerah.

BOKB diklasifikasikan sebagai Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, bertujuan untuk mendukung program-program prioritas nasional di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kesehatan, dan percepatan penurunan stunting melalui

program Bangga Kencana. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan penggunaan metode keluarga berencana dan memastikan hasil kesehatan yang berkelanjutan bagi keluarga.

Medan, sebagai ibu kota Sumatera Utara, memiliki jumlah penduduk yang signifikan dengan permintaan yang tinggi akan layanan keluarga berencana. Berdasarkan data, prevalensi Keluarga Berencana Modern di Medan pada tahun 2023 baru mencapai 55,1%, masih jauh dari target nasional 63,41% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Meskipun anggaran BOKB di Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun implementasi kebijakan tersebut masih mengalami kendala. Tabel berikut menunjukkan realisasi anggaran BOKB di Medan.

Tabel 1.
Realisasi Anggaran BOKB Kota Medan Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 5.031.801.000,-	Rp. 2.791.916.793,-
2022	Rp. 13.421.753.000,-	Rp. 8.674.695.953,-
2023	Rp. 12.310.714.000,-	Rp.10.969.727.053,-

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran BOKB mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tidak cukup untuk mempengaruhi keberhasilan program Keluarga Berencana Modern. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada implementasi kebijakan secara keseluruhan. Aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan kesesuaian program dengan penerima manfaat, organisasi pelaksana, dan kelompok penerima manfaat. Dapat

dilihat juga bahwa prevalensi keluarga berencana modern bervariasi di seluruh kecamatan di Medan, seperti distribusi penggunaan keluarga berencana modern pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.
Distribusi Persentasi Penggunaan KB Modern Tahun 2024 Se-Kota Medan

No	Kecamatan	Persentase (%)
1.	Medan Petisah	47,7 %
2.	Medan Tuntungan	50,1 %
3.	Medan Johor	53,8 %
4.	Medan Amplas	55,9 %
5.	Medan Kota	56,8 %
6.	Medan Labuhan	56,8 %
7.	Medan Area	57,9 %
8.	Medan Helvetia	59,3 %
9.	Medan Timur	59,3 %
10.	Medan Marelan	60,0 %
11.	Medan Belawan	60,8 %
12.	Medan Polonia	61,1 %
13.	Medan Maimun	61,2 %
14.	Medan Barat	61,3 %
15.	Medan Deli	61,6 %
16.	Medan Denai	63,2 %
17.	Medan Perjuangan	63,6 %
18.	Medan Sunggal	65,6 %
19.	Medan Selayang	65,9 %
20.	Medan Baru	67,6 %
21.	Medan Tembung	67,9 %
Total		56,56%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Petisah memiliki persentase pelaksanaan Keluarga Berencana Modern yang paling rendah yaitu sebesar 47,7%, sedangkan Kecamatan Medan Tembung memiliki persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 67,9%. Data ini mendorong pemilihan kedua kecamatan tersebut sebagai responden dalam kuesioner penelitian untuk membandingkan penyebab rendahnya

serapan KB Modern di Medan Petisah dan tingginya serapan di Medan Tembung, meskipun keduanya sama-sama terpengaruh oleh Implementasi Kebijakan BOKB.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi Kebijakan BOKB dan Program Keluarga Berencana telah dikaji, dengan berbagai pokok bahasan yang saling berkaitan. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Pemanfaatan dana BOKB belum menunjukkan hasil yang efektif, terbukti dengan belum tercapainya target laju pertumbuhan penduduk, persentase akseptor KB, serta indeks pembangunan manusia yang memadai. Meskipun telah dilakukan upaya produktivitas dan efisiensi, kepuasan kelompok dan pencapaian tujuan dana BOKB belum optimal (Khalish et al., 2020). Masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja, meskipun masih ada orang tua yang tidak hadir. Sistem pelaporan BOKB dilakukan setiap semester, dan pelaksanaannya berjalan dengan baik (Anggoro, 2018). Implementasi kebijakan keluarga berencana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen konseling dan kualitas pelayanan kontrasepsi di Kabupaten Garut. Kebijakan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan (Erliani, 2017). Implementasi kebijakan keluarga berencana belum optimal, dengan rendahnya partisipasi KB pria. Faktor-faktor seperti keterampilan petugas, kualitas sumber daya manusia, dan konteks sosial budaya berperan dalam pencapaian yang rendah ini (Zaeni, 2006). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan BOKB di berbagai daerah. Selain itu, desentralisasi yang memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola program ini juga telah menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaannya, terutama karena adanya perbedaan kapasitas dan komitmen antar daerah. Di Medan, masalah ini diperumit oleh tantangan dalam koordinasi antar lembaga, sumber daya manusia yang terbatas, serta preferensi dan perilaku masyarakat yang beragam.

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terhadap keberhasilannya di Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengukur sejauh mana faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan program. Selain itu, studi ini membandingkan implementasi kebijakan di dua kecamatan dengan tingkat prevalensi Keluarga Berencana Modern yang berbeda, yaitu Kecamatan Medan Petisah dan Medan Tembung, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Fokus penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola program Keluarga Berencana secara lebih efektif, guna meningkatkan kesehatan reproduksi dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan di Kota Medan dalam mendukung keberhasilan program ini.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan aktivitas untuk memberikan output kebijakan yang

dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah publik. Salah satu model implementasi kebijakan yang dapat digunakan agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya adalah model kebijakan implementasi George Edward III. Model ini diimplementasikan dengan pola (*Top Down*) dari atas ke bawah. Pendekatan implementasi kebijakan *Top Down* adalah keputusan kebijakan yang dibentuk oleh pejabat pemerintah (pusat) dan implementasi kebijakan yang terpusat dilakukan oleh administrator atau birokrat di tingkat bawah (Agustino, 2016). Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III mengungkapkan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Edwards III, 1980), yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980) menekankan bahwa komunikasi yang jelas antara pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yang, Zhang, dan Wang (2022) yang menunjukkan bagaimana pemerintah lokal di China menggunakan strategi *enlistment* untuk mengorganisir partisipasi warga dalam implementasi kebijakan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, "Melalui komunikasi formal dan informal, seperti pertemuan mobilisasi dan grup WeChat, para elit lokal mengarahkan warganya untuk melaksanakan tugas kebijakan dengan efektif. Dengan membangun

saluran komunikasi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan proses kebijakan yang akan dilaksanakan.

Edward III (1980) juga menyatakan bahwa komunikasi yang jelas antara pemangku kepentingan sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, ketidakpastian sering kali muncul ketika ada perbedaan antara kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dan cara kebijakan tersebut diimplementasikan oleh agen yang bertugas. Organisasi publik dapat menilai atau memprediksi arah kebijakan dan seberapa besar komitmen agen untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan memantau komunikasi yang terjadi antara kedua pihak ini (Kim, Hiatt, & Zhou, 2024). Komunikasi yang jelas antara agen pemerintah dan pembuat kebijakan memberi sinyal kepada perusahaan tentang komitmen implementasi kebijakan, mendorong mereka untuk berinvestasi lebih awal meskipun kebijakan tersebut belum diterapkan.

Proses komunikasi melibatkan interaksi antara perumus kebijakan, pelaksana, dan kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan koordinasi, dukungan, dan pemahaman yang kuat antar pihak yang terlibat (Sharla & Harlis, 2025). Selain itu, pelaksana kebijakan perlu berkomunikasi dengan kelompok sasaran agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan melibatkan instansi lain untuk mencapai tujuan yang lebih efektif (Rizki & Siahaan, 2023). Agar komunikasi kebijakan efektif, informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pelaksana sangat penting.

2) Sumber Daya

Sumber daya cukup sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III (1980) menyatakan

bahwa tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang direncanakan akan gagal. Dalam konteks kebijakan perubahan iklim, misalnya, teknologi dan sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Implementasi sistem pendukung keputusan geospasial, misalnya, sangat bergantung pada adanya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk infrastruktur teknologi maupun tenaga ahli yang terampil. Jika sumber daya terbatas, baik dalam hal tenaga kerja maupun teknologi, maka implementasi kebijakan bisa terhambat atau bahkan gagal (Bonfante et al., 2024). Oleh karena itu, jumlah dan kualitas sumber daya yang disediakan harus sesuai dengan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi.

Sumber daya, baik manusia maupun finansial, sangat memengaruhi kemampuan kebijakan publik untuk dijalankan dengan baik. Keterbatasan sumber daya sering kali mengarah pada solusi sementara dan menghambat perencanaan jangka panjang, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan tersebut (Kotnik et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang cukup sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Kekurangan tenaga ahli dapat menyebabkan keterlambatan dan penanganan yang kurang optimal di lapangan (Putri & Adiinto, 2025). Sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah dan kualitas staf pelaksana kebijakan, ketersediaan informasi yang relevan, kewenangan yang memadai bagi para pelaksana, serta fasilitas yang mendukung, seperti anggaran dan sarana kerja. Semua sumber daya ini harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalah yang dihadapi, ruang lingkup kebijakan, dan target yang

harus dicapai. Dengan kata lain, sumber daya yang tersedia harus proporsional dengan kebutuhan dan tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi, atau sikap implementor terhadap kebijakan, memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Disposisi yang baik, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, memungkinkan implementor untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan menjadi efektif. Sebaliknya, disposisi yang buruk dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam konteks program Vanguard, pendekatan bottom-up menekankan pentingnya pemberdayaan pemimpin lokal untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan solusi mereka sendiri. Pendekatan ini memberi lebih banyak kontrol kepada pemimpin lokal dalam pelaksanaan kebijakan, yang dianggap sebagai pergeseran dari model top-down tradisional. Program ini dirancang untuk mempercayakan pemimpin lokal dalam menentukan dukungan yang mereka butuhkan dari tingkat nasional. Namun, meskipun ada dukungan awal untuk otonomi lokal, ketegangan muncul ketika arahan dari tingkat nasional mulai berfokus pada hasil yang dapat diukur, yang menyebabkan frustrasi di tingkat lokal. Tekanan untuk menunjukkan hasil yang cepat ini menggambarkan bagaimana disposisi, baik dari implementor lokal maupun pembuat kebijakan nasional, berperan besar dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Coleman et al., 2021).

Hal serupa terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di Tanzania, di mana ditemukan

ketegangan antara tujuan nasional dan kenyataan di lapangan. Meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak, pengimplementasian kebijakan ini menunjukkan adanya ketidakpahaman di tingkat lokal, yang menyebabkan kebingungannya implementator, seperti kepala sekolah dan orang tua. Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan ekspektasi lokal menciptakan disonansi yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan (Shukia, 2020). Ini menggambarkan pentingnya disposisi yang selaras dengan kebijakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Sikap dan komitmen para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, sangat memengaruhi jalannya program dan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif (Coleman et al., 2021). Dengan demikian, disposisi implementor menjadi indikator krusial dalam memastikan keberhasilan kebijakan, karena disposisi yang tepat dapat mengurangi ketegangan antara tingkat nasional dan lokal serta memperlancar pelaksanaan kebijakan secara lebih efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada bagaimana organisasi atau lembaga membagi dan melaksanakan tugas-tugasnya. Pembagian tugas ini biasanya ditentukan oleh hirarki atau tingkatan dalam organisasi. Setiap level memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan semuanya dikendalikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme ini umumnya dirumuskan dalam apa yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah serangkaian instruksi yang ditulis dan dikembangkan oleh organisasi atau institusi untuk membantu karyawan atau anggota dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab mereka secara efisien dan efektif. SOP juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks implementasi kebijakan global, seperti Agenda 2030 dan NUA, ketidaksesuaian antara mandat dan tanggung jawab antar tingkatan pemerintahan dapat menghambat kolaborasi antara pemerintah nasional dan lokal. Di Kenya, misalnya, meskipun ada struktur institusional untuk mengkoordinasi implementasi SDGs, beberapa fungsi penting belum sepenuhnya didelegasikan ke pemerintah daerah, mengarah pada ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab di tingkat lokal (Croese et al., 2021). Kejelasan dalam struktur birokrasi dan pembagian tugas yang terkoordinasi di semua tingkatan pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

Keberhasilan Program

Keberhasilan suatu program ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Korten menyatakan bahwa sebuah program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara tiga elemen keberhasilan program. Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (penerima manfaat). Kedua, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dibutuhkan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana, tuntutan keputusan, yaitu kesesuaian antara kondisi yang diputuskan oleh organisasi untuk dapat

memperoleh keluaran program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib & Tarigan, 2008). Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan pemerataan manfaat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, program yang berhasil adalah program yang mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan (Korten, 1988).

Implementasi kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan program, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. David C. Korten adalah seorang ahli pembangunan yang menganjurkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial (Akib & Tarigan, 2008). Berikut ini adalah beberapa hubungan antara implementasi kebijakan dan keberhasilan program dari teori David C. Korten:

1) Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi kebijakan yang baik memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, yang sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang ditekankan oleh David C. Korten. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses tidak hanya memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan nyata di tingkat lokal. Studi ini menekankan bahwa pengecualian organisasi akar rumput dan pemangku kepentingan tingkat komunitas dari konsultasi menciptakan hambatan bagi implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, proses yang lebih inklusif, yang melibatkan komunitas lokal, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan adaptasi perubahan iklim dapat

menciptakan keberlanjutan dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang paling terdampak (Masud & Khan, 2024).

2) Kesenjangan Sosial

Implementasi kebijakan yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, yang merupakan salah satu isu penting yang diperjuangkan oleh David C. Korten. Dengan kebijakan yang fokus pada keadilan dan pemerataan sosial, program pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Namun, studi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan dasar bebas biaya telah meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan ekonomi rendah, kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan ini belum disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sekolah dan siswa, terutama di daerah pedesaan dan kurang berkembang. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam memastikan pendidikan yang adil dan berkualitas untuk semua anak, yang merupakan langkah penting untuk mengurangi kesenjangan sosial (Shukia, 2020).

3) Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang yang diinginkan oleh David C. Korten. Studi ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sebagai elemen dasar dalam mengatasi ketidaksetaraan sistemik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan menciptakan kemitraan yang inklusif, transparan, dan kolaboratif, masyarakat diberdayakan

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sambil mempromosikan kesetaraan kesehatan dan ketahanan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan pembangunan yang kompleks, sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan jangka panjang dari komunitas yang terlibat (Lansing et al., 2023).

4) Kemitraan dan Kolaborasi

David C. Korten menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membangun kemitraan yang kuat dapat memperkuat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Studi ini juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sebagai elemen dasar dalam mengatasi ketidaksetaraan sistemik. Dengan menciptakan kemitraan yang inklusif, transparan, dan kolaboratif, masyarakat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sambil mempromosikan kesetaraan kesehatan dan ketahanan. Sinergi yang terjalin dari kolaborasi ini akan menciptakan solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan jangka panjang dari komunitas yang terlibat (Lansing et al., 2023).

Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan program. Berdasarkan teori Edward III, jika komunikasi kebijakan jelas, sumber daya mencukupi, implementor memiliki sikap

yang mendukung, dan birokrasi berjalan secara efisien, maka implementasi kebijakan akan mencapai hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Korten yang menyatakan bahwa keberhasilan program tergantung pada kesesuaian antara program, penerima manfaat, dan organisasi pelaksana.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan ini juga relevan dalam Kebijakan BOKB, dimana keberhasilan program KB modern sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, edukasi, dan koordinasi yang baik antar instansi. Pelaksanaan kebijakan BOKB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan program KB. Berikut ini adalah beberapa pengaruh implementasi kebijakan BOKB terhadap keberhasilan kebijakan KB:

1) Akses dan Pelayanan

Bantuan operasional dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB, seperti kontrasepsi, konseling, dan edukasi. Dengan adanya bantuan operasional, fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan KB yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, dukungan finansial ini juga memungkinkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, sehingga dapat memperluas cakupan penerima layanan dengan lebih efektif.

2) Konseling dan Edukasi

Bantuan operasional juga dapat digunakan untuk meningkatkan program konseling dan edukasi tentang keluarga berencana. Melalui program penyuluhan yang efektif, masyarakat akan lebih memahami

pentingnya keluarga berencana dan cara-cara yang tepat untuk melaksanakannya. Dengan adanya peningkatan pemahaman, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

3) Ketersediaan dan Kualitas Layanan

Dengan adanya dukungan operasional, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keluarga berencana. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan dampak positif bagi kesehatan reproduksi dan keluarga. Selain itu, peningkatan layanan ini juga berpotensi untuk menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat.

4) Partisipasi Masyarakat

Bantuan operasional juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung keberhasilan program KB sangat krusial. Sebagaimana ditegaskan oleh, intervensi sensitif yang diarahkan kepada keluarga dan lingkungan memiliki porsi lebih besar dan daya ungkit lebih tinggi dibandingkan dengan intervensi spesifik dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat (Riwayati & Mutmainnah, 2024). Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga secara

keseluruhan.

5) Pemantauan dan Evaluasi

Bantuan operasional juga dapat digunakan untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi program KB. Dengan adanya dana yang cukup untuk monitoring dan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan program dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa program KB berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara dinamis.

Pelaksanaan BOKB merupakan kebijakan operasional yang dirancang untuk mendukung keberhasilan program KB modern. Dalam pelaksanaan BOKB, pemerintah memberikan berbagai dukungan, seperti operasional distribusi alat kontrasepsi, konseling, dan dukungan sistem informasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan angka fertilitas total dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB modern.

Model implementasi Edward III memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memahami variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi yang efisien. Selain itu, teori Korten menekankan pada kesesuaian antara program, penerima manfaat, dan organisasi pelaksana sebagai faktor kunci keberhasilan program. Dalam konteks kebijakan BOKB, penerapan teori-teori tersebut dapat meningkatkan efektivitas program KB modern dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode asosiatif dengan analisis data kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel (Sugiyono, 2021), yang dalam konteks ini adalah pengaruh implementasi kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terhadap keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) Modern di Kota Medan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Medan, serta di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Petisah, selama kurang lebih tiga bulan. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaksana BOKB yang terdiri dari 4.182 orang, yang terdiri dari 100 penyuluh dan 4.082 orang masyarakat, sebagian besar adalah perempuan. Dari populasi tersebut, sampel penelitian diambil menggunakan rumus Slovin dengan total 100 responden. Sampel ini dipilih secara acak menggunakan metode stratified random sampling, yang berarti sampel dibagi berdasarkan strata tertentu. 50 orang diambil dari perwakilan Dinas Pemberdayaan, 25 orang perwakilan dari Kecamatan Medan Tembung (yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam program KB Modern), dan 25 orang perwakilan dari Kecamatan Medan Petisah (yang memiliki tingkat keberhasilan rendah dalam program KB Modern).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk menilai sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan. Skala Likert ini memiliki tingkat penilaian yang biasanya terdiri dari lima pilihan, mulai dari sangat setuju hingga sangat

tidak setuju, yang memungkinkan pengukuran tingkat pendapat atau sikap responden terhadap isu yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 4.1.1.5, yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Dalam analisis ini, terdapat dua model yang diuji

1) Model Pengukuran (*Outer Model*): Pada tahap ini, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang dimaksud, sedangkan reliabilitas mengukur konsistensi hasil jika instrumen yang sama digunakan berulang kali.

2) Model Struktural (*Inner Model*): Pada model struktural ini, hubungan antar variabel diuji. Salah satu parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi model ini adalah nilai R^2 . Nilai R^2 ini menunjukkan seberapa besar variabel independen (misalnya, implementasi kebijakan BOKB) dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen (keberhasilan program KB Modern). Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980), yang memfokuskan pada empat indikator kunci—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terhadap keberhasilan program KB Modern di Kota Medan. Teori ini diintegrasikan dengan perspektif Korten (1988), yang menilai kesesuaian antara program, penerima manfaat, dan organisasi pelaksana sebagai kriteria utama untuk mengukur keberhasilan suatu program. Fokus utama dari penelitian ini adalah

untuk mengidentifikasi dua masalah besar: pertama, bagaimana implementasi kebijakan BOKB dapat memengaruhi keberhasilan program KB Modern di Kota Medan, dan kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Konteks penelitian ini berhubungan dengan tantangan yang dihadapi oleh kebijakan desentralisasi pengelolaan program KB pasca-reformasi, yang memunculkan variasi dalam prioritas dan alokasi anggaran di tingkat daerah. Meskipun anggaran BOKB di Medan mengalami peningkatan signifikan (realisasi 89,11% pada 2023), data menunjukkan bahwa prevalensi KB Modern (56,56%) masih berada jauh di bawah target nasional (63,41%), yang menunjukkan adanya masalah dalam pencapaian sasaran program tersebut.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Terhadap Keberhasilannya Di Kota Medan

Keberhasilan Program KB Modern meningkat karena Masyarakat dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki sikap mendukung kebijakan dan hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini. Variabel X Implementasi Kebijakan BOKB untuk indikator yang paling berpengaruh yaitu Seluruh Implementor Mendukung Implementasi Kebijakan BOKB dengan nilai Item Pertanyaan ke-9 = 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal berperan penting dalam efektivitas kebijakan tersebut. Namun, meskipun ada dukungan yang besar, faktor sumber daya manusia yang mengimplementasikan kebijakan

BOKB ternyata menjadi salah satu indikator yang kurang berpengaruh, dengan nilai item pertanyaan ke-4 sebesar 0,620. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada dukungan, keterbatasan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi dalam mengelola kebijakan ini masih menjadi tantangan.

Keberhasilan program KB Modern memiliki korelasi yang erat dengan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program tersebut, yang menunjukkan nilai item pertanyaan ke-8 sebesar 0,952. Ini menegaskan bahwa program KB Modern akan lebih berhasil jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang manfaat yang dapat mereka peroleh. Sebaliknya, indikator yang kurang berpengaruh adalah implementasi kebijakan BOKB yang mempengaruhi keberhasilan program KB Modern, dengan nilai item pertanyaan ke-5 sebesar 0,594. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan BOKB penting, faktor lain, seperti penyuluhan dan pemahaman masyarakat, lebih menentukan keberhasilan program tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan BOKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program KB Modern, dengan nilai koefisien sebesar 0,883. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-statistic sebesar 47,581, yang lebih besar dari t-table 1,66, dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan BOKB memang memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program KB Modern. Selain itu, nilai koefisien determinasi yang sebesar 78% menunjukkan bahwa 78% dari varians keberhasilan program KB Modern dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan BOKB, sedangkan 22% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup

dalam penelitian ini.

Meskipun kebijakan BOKB menunjukkan pengaruh yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran dan tenaga kerja yang dapat menghambat efektivitas program KB Modern. Berdasarkan laporan BKKBN tahun 2022, sekitar 24% kabupaten/kota melaporkan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program BOKB, sementara 18% lainnya menghadapi masalah kekurangan jumlah tenaga kerja, seperti penyuluh dan kader KB. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada dana yang dialokasikan, pengelolaan yang kurang optimal dan kekurangan tenaga yang kompeten mengurangi dampak positif kebijakan tersebut di tingkat lokal.

Selain itu, survei nasional yang menunjukkan hanya 62% pasangan usia subur yang terlayani secara optimal oleh program KB juga menyoroti adanya kesenjangan dalam cakupan layanan KB di berbagai daerah. Kesenjangan ini berpotensi menyebabkan ketidakmerataan dalam pencapaian tujuan nasional dalam meningkatkan penggunaan KB Modern.

Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan BOKB dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan KB Modern, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya pelatihan bagi petugas lapangan, serta kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat program KB Modern juga menjadi faktor penghambat

keberhasilan kebijakan ini.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BOKB. Melalui berbagai saluran komunikasi publik, pemerintah menyampaikan informasi faktual kepada publik dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan mengedukasi kelompok sasaran terkait kebijakan tertentu (de Vries, 2020). Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan BOKB kepada penyuluh KB dan PPKBD/Sub PPKBD sangat krusial, karena mereka berperan sebagai garda depan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, konsisten, dan jelas antara pemerintah, penyuluh KB, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan BOKB. Penyuluh KB dan PPKBD/Sub PPKBD yang mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten mampu menjelaskan kebijakan tersebut dengan baik kepada masyarakat tanpa ada distorsi. Kejelasan informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya diterima dengan baik tetapi juga dimengerti dengan benar oleh semua pihak yang terlibat. Misalnya, apabila informasi terkait manfaat KB Modern tidak disampaikan dengan jelas, masyarakat bisa saja salah paham atau menganggap kebijakan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Penyuluh KB memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, yang seringkali bergantung pada saluran komunikasi langsung seperti pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyuluh KB memahami pesan kebijakan secara mendalam dan dapat menjelaskannya secara tepat kepada masyarakat. Hal ini akan mengurangi

kemungkinan kesalahpahaman yang dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan BOKB, penggunaan berbagai saluran komunikasi, seperti spanduk, leaflet, radio, media sosial, dan pertemuan langsung, telah terbukti efektif. Spanduk dan leaflet adalah media tradisional yang masih digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki akses internet yang memadai. Media ini efektif untuk menyampaikan informasi umum yang mudah dipahami oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Namun, seiring berkembangnya teknologi, media komunikasi digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram semakin dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait program KB Modern, terutama kepada generasi muda. Penggunaan platform digital ini sangat relevan mengingat semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memungkinkan penyuluh KB untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Sosialisasi melalui media sosial juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, dan menyebarkan materi edukasi yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti infografis, video pendek, dan cerita inspiratif.

Pemanfaatan media komunikasi digital juga sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran generasi muda tentang manfaat program KB Modern. Generasi muda, terutama pasangan usia subur, menjadi sasaran utama dari program KB Modern. Namun, mereka sering kali tidak memiliki informasi yang memadai atau merasa kurang teredukasi tentang

manfaat KB, sehingga mereka cenderung mengabaikan program ini. Dengan komunikasi yang terstruktur melalui media sosial, penyuluh KB dapat mengubah pandangan masyarakat tentang KB Modern, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengaturan jumlah anak dan keluarga yang sehat.

b) Sumber Daya

Sumber daya, baik manusia maupun material, memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan BOKB. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa mayoritas penyuluh KB di Kota Medan memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, dengan sebagian besar di antaranya memiliki gelar Diploma 3. Kualifikasi ini penting karena tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperkuat pemahaman penyuluh terhadap materi yang mereka sampaikan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan berguna bagi masyarakat. Namun, meskipun kualifikasi SDM di Dinas terkait sudah cukup baik, masalah utama yang masih muncul adalah jumlah tenaga penyuluh dan kader KB yang terbatas.

Rasio penyuluh terhadap pasangan usia subur yang mencapai 1:12.000 merupakan angka yang sangat tinggi dan menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap pasangan usia subur dapat dijangkau secara efektif. Jumlah penyuluh yang terbatas, terutama di daerah terpencil, membuat cakupan layanan KB tidak merata, karena penyuluh tidak dapat menjangkau seluruh populasi sasaran secara optimal. Di sisi lain, daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi atau dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi membutuhkan lebih banyak penyuluh untuk memberikan edukasi yang komprehensif dan mendalam.

Pentingnya pelatihan berkala bagi kader KB tidak dapat dipandang sebelah

mata. Kader KB merupakan ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat KB Modern dan cara penggunaannya. Namun, hanya sekitar 58% kader KB yang pernah mendapatkan pelatihan secara berkala. Kekurangan pelatihan ini dapat berdampak negatif pada kualitas penyampaian informasi yang diberikan oleh kader kepada masyarakat. Tanpa pelatihan yang memadai, kader KB mungkin tidak akan mampu menjelaskan dengan baik program KB, serta manfaat dan cara penggunaannya, yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program KB Modern.

Selain ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan BOKB. Fasilitas yang memadai akan mempermudah pelaksanaan program, baik dalam hal penyuluhan maupun distribusi alat kontrasepsi. Balai Penyuluhan KB, sebagai pusat kegiatan penyuluhan, sangat penting untuk memberikan ruang bagi interaksi antara penyuluh dan masyarakat. Namun, kenyataannya, beberapa wilayah, seperti Kecamatan Medan Petisah, masih tidak memiliki fasilitas ini. Kekurangan fasilitas ini jelas menghambat pelaksanaan kebijakan karena masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak memiliki tempat yang memadai untuk mengakses layanan KB dan informasi terkait.

Keterbatasan sumber daya ini berdampak besar pada efektivitas kebijakan BOKB di tingkat daerah. Meskipun kebijakan ini mendapatkan anggaran yang cukup besar, tanpa didukung oleh jumlah tenaga penyuluh yang memadai dan fasilitas yang memadai, pencapaian tujuan kebijakan tersebut akan terhambat. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh di daerah terpencil menyebabkan ketidakmerataan layanan, yang mengarah pada rendahnya tingkat partisipasi

masyarakat dalam program KB Modern. Ketidacukupan pelatihan bagi kader KB juga menyebabkan kualitas penyuluhan yang rendah, yang akhirnya berpengaruh pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program KB.

Selain itu, terbatasnya fasilitas seperti Balai Penyuluhan KB di beberapa daerah, terutama di Kecamatan Medan Petisah, juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, yang seharusnya dapat mengoptimalkan layanan KB di berbagai daerah.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan BOKB. Penelitian menunjukkan bahwa sikap positif, motivasi tinggi, dan komitmen dari penyuluh KB, PPKBD/Sub PPKBD, serta pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan sangat mendukung keberhasilan program. Namun, tanpa dukungan yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya maupun insentif, motivasi dan komitmen ini bisa menurun. Dalam banyak kasus, ketidakpastian tentang insentif atau penghargaan bagi pelaksana kebijakan dapat menyebabkan berkurangnya kinerja dan mengurangi dampak dari program itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan dukungan yang konsisten, termasuk insentif yang sesuai, agar pelaksana kebijakan tetap memiliki motivasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Kader KB, sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat komunitas, memiliki peran penting dalam menyosialisasikan informasi, mendampingi

masyarakat, dan memantau pelaksanaan program. Namun, efektivitas kader KB sering kali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, keterampilan, dan insentif yang mereka terima. Kader KB tidak mendapatkan pelatihan yang memadai atau sering kali kurang mendapat dukungan dalam bentuk pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan ini dapat membatasi kemampuan kader dalam menjelaskan program dengan tepat kepada masyarakat dan mengatasi keraguan atau hambatan yang ada. Tanpa pembekalan yang cukup, kader KB mungkin tidak mampu memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh, yang pada akhirnya dapat mengurangi keberhasilan program KB Modern.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien mendukung kelancaran implementasi kebijakan BOKB. Dalam konteks kebijakan BOKB, penyuluh KB dan kader KB bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, sementara pihak manajerial di Dinas P3AP2KB memiliki peran dalam pengawasan, koordinasi, dan evaluasi. Dengan struktur yang jelas, setiap pihak tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan, sehingga meminimalkan tumpang tindih tugas atau kebingungannya peran masing-masing.

Kedua, struktur yang terorganisir memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Dalam implementasi kebijakan BOKB, pengambilan keputusan yang cepat sangat penting karena seringkali situasi di lapangan memerlukan respon yang segera, seperti saat ada masalah teknis atau logistik yang menghambat pelaksanaan program. Ketika kewenangan dan tanggung jawab sudah terdelimitasi dengan jelas, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan

lebih cepat, tanpa adanya kebingungannya prosedural.

Ketiga, dengan struktur yang terorganisir, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pengawasan yang tepat waktu dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas memudahkan pihak manajerial untuk melakukan monitoring dan evaluasi program di setiap tahap, serta memastikan bahwa segala permasalahan yang muncul dapat segera diatasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, temuan-temuan tersebut memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Penelitian ini menggali lebih jauh tentang disposisi (sikap dan komitmen pelaksana), sumber daya manusia, serta pengetahuan masyarakat sebagai elemen-elemen kunci dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam hal ini, disposisi (nilai 0,814) terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh, sementara keterampilan sumber daya manusia (nilai 0,620) memiliki pengaruh yang lebih rendah. Meskipun demikian, seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program KB Modern.

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terbukti memiliki pengaruh paling signifikan dalam pelaksanaan kebijakan BOKB. Nilai disposisi yang tinggi (0,814) menunjukkan bahwa ketika pelaksana kebijakan—baik itu penyuluh KB, kader KB, maupun pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana—memiliki sikap positif dan komitmen yang tinggi terhadap tujuan kebijakan, implementasi kebijakan cenderung lebih berhasil.

Meskipun disposisi pelaksana kebijakan menjadi faktor dominan, sumber daya manusia—terutama dalam hal keterampilan dan pelatihan—masih memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan BOKB. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterampilan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang lebih rendah (nilai 0,620), hal ini tidak dapat diabaikan. Terutama bagi kader KB, yang merupakan ujung tombak di lapangan, keterampilan dalam komunikasi, pemahaman mendalam tentang metode kontrasepsi, serta keterampilan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengikuti program sangat penting. Tanpa keterampilan yang memadai, kader KB tidak akan dapat memberikan penyuluhan yang efektif dan akurat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program KB Modern. Dengan nilai 0,952 pada indikator ini, temuan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan program. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat program KB Modern lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran dan kesehatan keluarga sangat diperlukan.

Namun, meskipun pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh, pelaksanaan kebijakan BOKB sendiri belum

berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat (nilai 0,594). Ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan ini telah dilaksanakan, tantangan dalam mencapai perubahan yang lebih luas pada tingkat masyarakat masih ada. Salah satu penyebabnya mungkin adalah ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan oleh penyuluh KB dan implementasi kebijakan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan sosialisasi harus lebih intensif dan lebih tepat sasaran, mengingat keberhasilan kebijakan KB Modern sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program KB Modern, dengan nilai koefisien 0,883 dan t-hitung 47,581 yang jauh lebih besar daripada t-tabel 1,66, serta signifikansi yang sangat rendah ($0,000 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa kebijakan BOKB memang memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan program KB Modern. Dengan kontribusi sebesar 78% ($R^2 = 0,780$), analisis jalur menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan program KB Modern dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan BOKB. Namun, sisa 22% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti faktor sosial budaya, ekonomi, atau kebijakan lain yang dapat memengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan KB Modern.

Daftar Pustaka

Abrianty, T., & Sujarwoto, S. (2017). Why decentralization in Indonesia is not

- good for reducing women fertility? Results from National Socio Economic Survey 2002-2014 and a case study. *Journal of Public Administration Studies*, 2(1), 45–63.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1, 1–19.
- Anggoro, O. B. (2018). *Implementasi Program Pembangunan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualitas Keluarga Di Kecamatan Kranggan, Temanggung*. Universitas Tidar.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*, 2022-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-%0Atable/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, & Kementerian Kesehatan. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. <https://archive.org/details/LaporanS DKI2017/page/n1/mode/1up>
- Bonfante, A., Monaco, E., Vitale, A., Barbato, G., Villani, V., Mercogliano, P., Rianna, G., Mileti, F.A., Manna, P., Terribile. (2024). A geospatial decision support system to support policy implementation on climate change in EU. *Land Degrad Dev*, 35, 2046-2057. <https://doi.org/10.1002/ldr.5042>
- Coleman, A., Billings, J., Allen, P., Mikelyte, R., Croke, S., Macinnes, J., & Checkland, K. (2020). *Ambiguity and conflict in policy implementation: The case of the New Care Models (Vanguard) programme in England*. *Journal of Social Policy*, 50(2), 285-304. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000082>
- Croese, S., Oloko, M., Simon, D., & Valencia, S. C. (2021). *Bringing the global to the local: The challenges of multi-level governance for global policy implementation in Africa*. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 13(3), 435-447. <https://doi.org/10.1080/19463138.2021.1958335>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Erliani, H. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana terhadap Manajemen Konseling dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Konseling Kontrasepsi. *Jurnal Publik*, 11(2), 183–194.
- Khalish, M., Supriatna, T., & Mansur, H. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 489–514.
- Kim, E.-H., Hiatt, S. R., & Zhou, Y. M. (2024). Green screening: Firm environmental strategy amidst policy implementation uncertainty in the European Union. *Journal of Management Studies*, 62(4), 1450-1490. <https://doi.org/10.1111/joms.13085>
- Korten, D. C. (1988). Community Organization and Rural Development A Learning Process Approach. *Public Administration Review*, 76(2), 351–362.
- Kotnik, Ž., Umek, L., Kovač, P.,

- Stanimirović, D., & Vintar, M. (2020). *Analysis of the key factors for successful public policy implementation: A qualitative study in Slovenia*. *DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review*, 11(2), 113–140. <https://doi.org/10.2478/danb-2020-0007>
- Lansing, A. E., Romero, N. J., Siantz, E., Silva, V., Center, K., Casteel, D., & Gilmer, T. (2023). *Building trust: Leadership reflections on community empowerment and engagement in a large urban initiative*. *BMC Public Health*, 23(1), 1252. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15860-z>
- Masud, S., & Khan, A. (2024). *Policy implementation barriers in climate change adaptation: The case of Pakistan*. *Environmental Policy and Governance*, 34(1), 42–52. <https://doi.org/10.1002/eet.2054>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan II. (II). Gava Media.
- Putri, N., & Adiarto. (2025). Kolaborasi Organisasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 38–52. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.20493>
- Riwayati, A., & Mutmainnah. (2024). Strategi Penurunan Stunting Dinas Kesehatan Kota Pontianak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 175–183. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.13501>
- Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) DI Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(1).
- Rizki, M. F., Siahaan, A. Y. S., & Ginting, S. (2024). Capacity Development in Realizing Child-Friendly Regency at The Population Control, Family Planning, Woman Empowerment, and Child Protection Agency of Serdang Bedagai Regency. *2DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 22(2), 88–99.
- Sharla, D. F., & Harlis, F. P. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/DOI10.25299/jiap.2025.19730>
- Shukia, R. (2020). *Fee-free basic education policy implementation in Tanzania: A 'phenomenon' worth rethinking*. *Huria Journal*, 27(1), 115–138.
- Sugiyono. (2021). *Educational research methods: Quantitative, Qualitative, and R and D approaches*. Alfabeta.
- Yang, F., Zhang, Z., & Wang, S. (2022). *Enlisting citizens: Forging the effectiveness of policy implementation in local China*. *Journal of Chinese Governance*, 7(3), 400–417. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1846294>
- Zaeni, A. (2006). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Grinsing*. In *Tesis Magister Administrasi Publik*, Universitas Diponegoro, Semarang. Universitas Diponegoro.